

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 21 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Publik Dukung Pembatasan Praktik Politik Dinasti

■ Survei Voxpol

JAKARTA - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan perdebatan sengit terkait perkembangan dinasti politik di Indonesia. MK mengeluarkan keputusan yang mengguncang dinamika politik Indonesia, yakni mengenai batasan usia calon presiden, dengan penambahan norma berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Dinasti politik, yang merujuk pada praktik mewariskan kekuasaan politik kepada anggota keluarga atau keturunan pejabat yang telah menduduki jabatan politik sebelumnya, menjadi isu kritis yang berpengaruh terhadap masa depan demokrasi Indonesia," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago, Jumat (20/10).

"Praktik politik dinasti sudah menjadi kebiasaan buruk para politikus. Hal itu juga menjadi ancaman serius terhadap penurunan kualitas demokrasi itu sendiri," tambahnya.

Hal itu senada dengan persepsi publik yang tergambar dalam survei Voxpol, yang memperlihatkan mayoritas responden (69,3 persen) tidak setuju adanya praktik politik dinasti.

"Sementara mayoritas lainnya (67,9 persen) percaya bahwa praktik semacam ini dapat merusak kualitas demokrasi. Bahkan, sebanyak 74,8 persen responden mendukung adanya regulasi yang membatasi praktik politik dinasti," tandasnya.

Pangi menjelaskan, putusan MK seolah mengabaikan nuansa kebimbangan publik karena lebih mementingkan hasrat kekuasaan yang akan menyeret MK dalam pusaran politik destruktif secara internal, maupun demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.

"Salah satu aspek yang paling mencolok dalam putusan MK adalah ketidaksetaraan dalam demokrasi. Ketika anak seorang presiden maju dalam pemilihan umum, terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan," tegasnya.

Kepentingan Keluarga

"Selain itu, keputusan MK juga memunculkan isu konflik kepentingan yang patut dicermati. MK dianggap tenggelam dalam pusaran ketidakjelasan etika, terutama karena pimpinannya memiliki hubungan keluarga dengan presiden," imbuhnya.

Apalagi, lanjut dia, perkara yang sedang disidangkan sangat erat kaitannya dengan kepentingan keluarga. Hal itu memunculkan pandangan bahwa MK seakan menjadi "mahkamah keluarga" yang memberikan perlakuan istimewa kepada Gibran.

"Saat kita berbicara tentang keputusan MK, penting untuk mempertimbangkan apakah MK telah melampaui batas kewenangannya. Secara ideal, MK seharusnya hanya memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu peraturan bertentangan dengan konstitusi atau tidak," tambahnya.

Meski MK telah menolak untuk menurunkan batas usia minimal, mereka mencoba mengkalinya dengan menambahkan persyaratan baru. Yaitu pernah menjabat sebagai kepala daerah, yang jelas bukan menjadi kewenangan MK.

"Salah satu dampak terberat dari putusan MK adalah kredibilitas lembaga tersebut sebagai penjaga konstitusi, akan digugat dan dipertanyakan. Ketika putusan MK yang diharapkan memulihkan kepercayaan publik, justru dianggap merusak kualitas demokrasi," sesalnya.

Dia menambahkan, masyarakat juga harus menghadapi realitas bahwa lembaga tersebut telah berubah menjadi alat untuk membangun dinasti politik. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap perkembangan demokrasi, semua pihak harus terus memantau perkembangan tersebut. (H28-25)